

KEKERASAN DISKURSIF ATAS NAMA “WAR ON TERRORISM” : BENTUK BARU PELANGGARAN HAM

Muhammad Zuhdan

Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
mzoehdan@yahoo.com

Abstract: This paper is about to see the discourse of the war on terrorism by using Foucauldian perspective. The thesis said that the discourse of "war on terrorism" is a product of hegemonic power and therefore has created a discursive violence that threaten human rights. The purpose is to provide an alternative approach in view of global and national discourse on the issue of the war against terrorism. Research result found interest fact that the fight against terrorism has threatened civil liberties and political freedom from violence discursive hegemony of power produced by the global and national levels. In addition this paper also offers how a modern government should do to counter terrorism based on Foucauldian approach.

Keywords: Terrorism, Discourse, Hegemony, Discursive Violence, Human Rights

Pengantar

Pasca 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Barat berusaha keras untuk menjadikan terorisme sebagai ancaman baru demokrasi liberal Barat (Chalk, 2002 : 40). Terorisme memang bukan istilah baru yang dikenal oleh dunia Barat, tetapi menjadi istilah antagonistik ketika dihadapkan dengan demokrasi liberal Barat Pasca Tragedi 9/11. Perang melawan terorisme yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat (AS) itu kemudian membuat hampir semua negara-negara di belahan

dunia mau tidak mau harus satu garis komando dengan Amerika Serikat. “*Either you are with us or you are with the terrorism*”. Penggalan pidato Bush tersebut memperlihatkan AS memainkan sebuah politik bipolar yang sangat antagonistik, kawan atau lawan (Soleim, 2006).

Pihak-pihak yang mau satu barisan komando dengan AS dalam perang melawan terorisme akan disebut sebagai kawan AS dan yang menolak bergabung akan disebut sebagai musuh AS. Secara tidak langsung, AS ingin mengatakan

bahwa negara-negara atau pihak-pihak non-negara yang tidak mau satu barisan dengannya melawan terorisme akan disebut sebagai kelompok yang anti demokrasi.

Amerika Serikat berhasil memainkan politik antagonistik tersebut yang kemudian dari situ lahirlah konsep musuh bersama yang harus diperangi secara global, yaitu teroris. Masalah muncul ketika definisi dan kategorisasi “teroris” itu juga harus ikut dengan apa yang diwacanakan oleh Amerika Serikat. Untuk dapat mengatakan siapa yang dianggap teroris dan siapa yang tidak dianggap teroris harus sesuai dengan apa yang diwacanakan oleh Amerika Serikat.

Dari politik bipolar antago-nistik, AS kemudian memainkan politik diskursif yang tujuannya untuk menghegemoni wacana terorisme secara global. Semua wacana dan pengetahuan tentang terorisme Amerika Serikatlah yang menjadi produsen tunggalnya. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan global maupun nasional melawan terorisme mau tidak mau harus mengadopsi wacana

dan pengetahuan yang diproduksi oleh Amerika Serikat tersebut.

Proses hegemonisasi AS dalam perang melawan terorisme menjadi strategi politik yang lebih jitu ketimbang harus mengerahkan kekuatan militer untuk memberantas terorisme karena dengan hegemoni tersebut maka Amerika Serikat dapat menciptakan *global governance* dan politik unipolar untuk menggerakkan semua negara dalam perang melawan terorisme. Dengan kata lain, melalui hegemoni tersebut, maka Amerika Serikat dapat menciptakan musuh bersama dan sekaligus menciptakan kekuatan bersama untuk melawan musuh bersama tersebut.

Anna Cornelia Beyer (2012) dalam “*Hegemony and Power in The Global War Terrorism*” memaparkan dengan jelas bagaimana Amerika Serikat punya peran kuasa yang sangat kuat dalam menghegemoni negara-negara secara global dalam perang melawan terorisme. Beyer dalam tulisannya tersebut juga memaparkan bahwa Amerika Serikat tidak dapat hanya menggunakan kekuatan material saja (baca : militer dan ekonomi) dalam perang melawan

terorisme, tetapi juga butuh kekuatan immaterial (baca: ide).

Bagi Beyer, keberhasilan Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme tidak hanya menciptakan kekuasaan material yang unipolar, tetapi juga kekuasaan ide yang unipolar. Oleh sebab itu, menurut Beyer kekuasaan hegemonik menjadi peran yang harus dipegang oleh Amerika Serikat agar dapat menciptakan pemerintahan hegemonik global yang akan memudahkan dalam men-*setting* agenda kebijakan sekaligus mengintervensi kebijakan negara-negara yang berada dalam satelit kekuasaannya. Beyer meyakini hal itulah yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam menciptakan kuasa hegemoni atas perang melawan terorisme.

O.P Richmond (2003), dalam *“Realizing Hegemony : Symbolizing Terrorism and Roots of The Conflict”* melihat latar belakang hegemoni dalam perang melawan terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan sudut pandang yang berbeda. Richmond melihat alasan utama Amerika Serikat untuk melakukan hegemoni

atas perang melawan terorisme karena untuk mempertahankan label dirinya sebagai simbol kekuatan dominasi dan super power dunia yang tidak tertandingi dan terkalahkan.

Simbol tersebut hilang dan diragukan ketika Al Qaida berhasil melakukan sebuah teror yang spektakuler menohok jantung kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat dengan menabrakkan pesawat ke Gedung *World Trade Center* (WTC) dan Gedung Pentagon pada 11 September 2001, padahal kedua tempat tersebut selama ini diyakini menjadi simbol kekuatan ekonomi dan militer AS. Di sisi lain, menurut Richmond, tujuan perang Al Qaida bukan ingin memenangkan sebuah *“real war”* tetapi *“immaterial war”*, yaitu dengan mendelegitimasi simbol dominasi AS sebagai negara adidaya. Oleh sebab itu, Richmond dalam karyanya tersebut meyakini bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi kekuasaan hegemonik dalam perang melawan terorisme dalam rangka untuk mempertahankan simbol dirinya sebagai negara adidaya yang tidak terkalahkan.

Muge Kinacioglu (2012) dalam *“War on Terror’ and Hegemony: Inter-national Law-Making Regarding Terrorism After 9/11”* memiliki pandangan lain atas upaya hegemoni Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Kinacioglu mengatakan bahwa hegemoni atas perang melawan terorisme diciptakan dalam rangka untuk mendorong munculnya norma baru dalam hukum internasional terutama untuk mendapatkan persetujuan legal atau resolusi dari Dewan Keamanan PBB untuk penggunaan kekuatan atau intervensi militer dan intervensi politik ke negara-negara yang dianggap sebagai sarang teroris. Kinacioglu melihat pasca tragedi 9/11 Amerika Serikat berkepentingan sekali menciptakan hegemoni perang melawan terorisme untuk menggalang dukungan dari Dewan Keamanan PBB agar memberikan resolusi intervensi militer atau pun intervensi politik ke negara-negara yang dianggap sebagai sarang teroris.

Misalnya saja, Amerika Serikat berhasil mendapatkan resolusi dari Dewan Keamanan PBB untuk menyerang Afganistan dalam rangka

memburu tokoh-tokoh maupun pengikut Al Qaida dan Taliban yang selama ini dianggap sebagai kelompok teroris. Tidak hanya Afganistan, tetapi negara-negara lain di seluruh belahan dunia harus mau menerima intervensi militer maupun intervensi politik sebagai bentuk penghormatan atas norma dan hukum internasional ketika Dewan Keamanan PBB sudah memberikan resolusi atas nama pemberantasan terorisme.

Dari beragam literatur di atas makin menguatkan tesis bahwa hegemoni memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perang melawan terorisme. Pertanyaannya sekarang bagaimana dampak hegemoni wacana perang melawan terorisme tersebut terhadap hak asasi manusia (HAM)? Pertanyaan tersebut muncul dari kenyataan empirik bahwasannya hegemoni wacana perang melawan terorisme tersebut justru melahirkan kekerasan diskursif yang mengancam HAM warga negara. Kekerasan diskursif sebagai manifestasi hegemoni perang melawan terorisme itulah yang menjadi fokus analisis tulisan ini. Metode analisisnya dengan analisis wacana

Foucauldian yang mengandaikan bahwa di balik wacana atau pengetahuan itu ada kekuasaan beserta teknologi kekuasaannya yang berfungsi mengatur (*Governmentality*) dan mendisiplinkan (*Discipline*) wacana tersebut.

Hegemoni Wacana, Kekerasan Diskursif, dan “War on Terror” dalam Perspektif Foucauldian: Kerangka Analisis

Tulisan ini menggunakan metode analisis wacana. Untuk memahami metode analisis wacana, penulis mencoba mengutip apa yang dikatakan Purbani (2005) yang mengatakan jika dalam pendekatan empirisme-positivisme maupun fenomenologi wacana terbatas pada pengertian unit kebahasaan, pernyataan, pemikiran, atau landasan penentuan dan pemahaman akan fakta-fakta, tetapi dalam konsep Foucault, wacana mengandung pengertian akan adanya *power* dan kekuasaan di balik pernyataan-pernyataan tersebut. Paham ini mempercayai bahwa relasi kekuasaan dalam masyarakat mempengaruhi dan membentuk cara-

cara bagaimana kita saling berkomunikasi dan bagaimana pengetahuan diciptakan.

Diskursus dipercayai sebagai piranti-piranti yang digunakan lembaga-lembaga untuk mempraktikkan kuasa-kuasa mereka melalui proses-proses pendefinisian, pengisolasian, dan membenaran. Ia menentukan mana yang dapat dikatakan, mana yang tidak terhadap suatu bidang tertentu, pada kurun waktu tertentu pula.

Lebih lanjut, Purbani juga menjelaskan unit analisis wacana terdiri atas sekumpulan peraturan-peraturan tak tertulis serta asumsi-asumsi yang dipahami bersama sebagai upaya untuk mengatur apa yang pantas ditulis, dipikirkan, dan dilakukan dalam suatu bidang.

Analisis wacana mempelajari bagai-mana peraturan-peraturan, konvensi-konvensi dan prosedur-prosedur yang membenarkan dan menentukan tata wacana (*discursive practice*). Ia menelusuri secara mendalam segala sesuatu yang dikatakan atau ditulis dalam masyarakat, sistem umum, repertoar dari topik-topik pembicaraan,

aturan-aturan yang dinyatakan yang mengatur apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh, apa yang dapat diperdebatkan dalam suatu bidang kajian.

Dalam konteks makalah ini, menurut Gramscian, hegemoni dijalankan melalui ide dan kepemimpinan moral yang dilakukan oleh kelas penguasa untuk menguasai kesadaran massa, tetapi bagi Foucauldian hegemoni dapat dijalankan melalui struktur wacana yang dibangun oleh kekuasaan yang tujuannya untuk menciptakan pengetahuan atau wacana yang *mainstream-dominatif* yang akan selalu membenarkan tindakan penguasa tanpa harus dengan represif tetapi melalui regulasi dan normalisasi (Foucault, 1980 : 96). Kata lain hegemoni menurut istilah Foucault adalah upaya menciptakan “*Regime of Truth*” sebagaimana yang dia nyatakan dalam karyanya “*Power and Knowledge*”, berikut penggalan pernyataannya.

“régime of truth, its ‘general politics’ of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true; the mechanisms and instances which enable one to

distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned; the techniques and procedures accorded value in the acquisition of truth; and the status of those who are charged with saying what counts as true (Foucault, 1980 : 131).”

Hegemoni Foucauldian tidak lagi mengandalkan pada struktur represif tetapi lebih mengandalkan struktur wacana. Adanya struktur wacana tersebut membuat pengetahuan atau “kebenaran” bukan sesuatu yang bersifat murni alamiah tetapi sudah mengalami dekonstruksi maknanya. Kemudian, ketika kuasa atas makna tersebut dipegang oleh struktur kekuasaan maka pengetahuan ataupun “kebenaran” sudah menjadi bias kekuasaan. Hegemoni wacana dijalankan dengan melalui konsep kerja yang diistilahkan Foucault sebagai teknologi kekuasaan yang berbentuk *biopolitic, governmentality, discipline, surveillance, dan exclusion*.

Menurut Foucault, hegemoni akan efektif ketika kekuasaan dapat memahami berjalannya *biopolitic*. Foucault melihat bahwa manusia itu sebuah entitas biologi yang butuh

diadministrasikan dalam urusan kelahiran, kematian, kesehatan, populasi, kependudukan, dan sebagainya, sebagaimana yang Foucault nyatakan dalam karyanya "*History Of Sexuality*", berikut penggalan pernyataannya :

"on the species body, the body imbued with the mechanisms of life and serving as the basis of the biological processes: propagation, births and mortality, the level of health, life expectancy and longevity, with all the conditions that can cause these to vary. Their suspension was effected through an entire series of interventions and regulatory controls: a biopolitics of the population (Foucault, 1990 : 139)".

Pengaturan administratif manusia (baca: *governmentality*) sebagai entitas biologis itu merupakan sebuah bentuk kekuasaan tersendiri yang berbeda dari kekuasaan deterministik ekonomi sebagaimana yang digambarkan oleh Marx.

Kekuasaan mengatur manusia sebagai entitas biologis itu disebut Foucault sebagai *biopower*. Melalui *biopower* ini, penguasa dapat memiliki kuasa hegemoni pengetahuan dan kebenaran atas masyarakat sampai urusan yang

terkecil. Hegemoni pengetahuan dan kebenaran tersebut sampai membuat manusia sebagai entitas biologi tersebut tidak punya sebuah konter hegemoni karena kuasa akan definisi dan makna juga sudah diatur secara administratif yang lama kelamaan makna dan definisi tersebut dianggap sebagai kebenaran yang harus diterima secara formal oleh masyarakat.

Kemudian bagi Foucault, hegemoni wacana juga dapat dilakukan melalui praktik pendisiplinan. Tubuh manusia perlu diatur dalam entitas politik yang lebih mikro dan spesifik, misalnya di sekolahan, rumah sakit, penjara, tempat kerja, barak militer, dan sebagainya (Foucault, 1977 : 168).

Metode pengaturannya melalui sebuah pengawasan kepada individu-individu agar individu-individu tersebut disiplin sebagaimana yang diharapkan oleh sang kuasa pengawas. Pengawasan ini tidaklah langsung menghadirkan sebuah kekuasaan represif-empirik tetapi cukup dengan menghadirkan kekuasaan abstrak yang seolah-olah selalu hadir dalam alam pikiran individu-

individu yang diawasi tersebut yang membuat dia secara otomatis mendisiplinkan diri dengan sendirinya tanpa harus langsung diawasi seorang petugas pengawas.

Inilah yang disebut Foucault sebagai *panopticon effect*. Melalui praktik pendisiplinan dengan metode *panopticon effect* ini hegemoni wacana akan selalu hadir dalam alam pikir dan kesadaran masyarakat tanpa harus menghadirkan aparat negara untuk mendampingi ataupun mengawasi langsung per individu-individu dalam masyarakat tersebut. Adanya *panopticon effect* ini wacana yang diproduksi penguasa akan menjadi menu wacana tunggal yang harus dienyam oleh masyarakat karena kalau tidak mau mengenyam seolah-olah akan ada pengawasan dan ancaman hukuman tersendiri yang selalu hinggap dalam pikiran.

Lalu, hegemoni wacana juga dapat dilakukan melalui praktik eksklusi. Penguasa menurut Foucault memiliki otoritas untuk menyusun dan memilah wacana. Penyusunan dan pemilahan wacana bukanlah sebuah proses apolitis yang nir-kepentingan tetapi justru penuh

makna dan kepentingan, sebagaimana Foucault hipotesiskan dalam karyanya "*The Order of Discourse*" :

"that in every society the production of discourse is at once controlled, selected, organized and redistributed by a certain number of procedures whose role is toward off its powers and dangers, to gain mastery over its chance events, to evade its ponderous, formidable materiality (Foucault, 1981 : 54)

Menentukan wacana mana yang baik dan benar atau wacana mana yang buruk dan salah merupakan sebuah praktik eksklusi yang ada dalam setiap masyarakat. Adanya praktik eksklusi wacana ini membuat sebuah polarisasi dan antagonisme antar aktor. Aktor yang hegemoniklah yang akan dapat menciptakan sebuah wacana tunggal otoritatif, sedangkan aktor di luar itu hanya dapat mendapatkan eksklusi sehingga apapun wacana yang diproduksinya hanya dianggap sebagai wacana yang salah dan tidak layak diterima secara universal. Oleh sebab itu, melalui praktik eksklusi ini para penguasa dapat memiliki kuasa diskursif untuk menentukan siapa kawan yang harus

dirangkul dan siapa musuh yang harus diperangi.

Jika menggunakan pendekatan teoritiknya Foucault di atas, maka konsepsi tentang hegemoni wacana dan kekerasan diskursif dalam “*war on terror*” dapat dilihat salah satu bentuknya sebagai berikut. Misalnya, ketika warga negara diposisikan sebagai entitas biopolitik maka di saat itu pula warga negara tidak memiliki kuasa atas makna atau pengetahuan tentang dirinya sendiri sehingga mudah oleh penguasa dikategorisasikan sebagai sosok yang memiliki ciri-ciri seorang teroris berdasarkan data-data administrasi biologis yang diproduksi secara monopoli oleh negara. Contoh kasus, seseorang itu memiliki data kelahiran dengan nama yang agak “ke-arab-arab-an” ataupun identik dengan nama Islam, maka dengan mudah sebuah negara melabelinya sebagai ciri-ciri seorang teroris. *Labeling* teroris yang direproduksi oleh negara berdasarkan data-data administratif biologis dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan diskursif.

Analisis Kekerasan Diskursif dalam “*War on Terrorism*”

Pernyataan Presiden George Bush, “*either you are with us or you are with the terrorism*”, secara eksplisit menunjukkan bahwa dunia ini terbelah antara pertarungan kekuatan baik (*good*) dan kekuatan jahat (*evil*) (Masykur, 2008). Walaupun cuma pernyataan tetapi apa yang dikatakan oleh Bush tersebut sebagai sebuah bentuk hegemoni wacana yang membuat ketegangan baru di berbagai negara.

Ketegangan tersebut terkait dengan kebijakan dalam negeri yang akan diambil oleh masing-masing negara dalam menyikapi isu terorisme, padahal dapat jadi isu terorisme bukan menjadi isu prioritas kebijakan negara-negara tersebut dan di sisi lain kebijakan perang melawan terorisme justru akan banyak melanggar HAM rakyatnya sendiri, tetapi karena yang memberikan pernyataan adalah seorang presiden sebuah negara paling adidaya maka mau tidak mau pernyataan tersebut telah menciptakan norma baru dalam hukum internasional yang mengikat semua

negara melampaui norma HAM universal. Jika tidak mau merealisasikan pernyataan tersebut maka sebuah negara akan dikucilkan bahkan dapat diperangi oleh Amerika Serikat dan sekutunya karena dianggap berteman dengan teroris. Hak *self determination* sebuah negara terancam juga karena ada hegemoni wacana yang dilontarkan

Kemudian Bush juga menyatakan, “*We are facing a new kind of enemy-somebody so barbaric that they would fly airplanes into a building full of innocent people* (FDCH Transcript, 2001 : 3)”. Istilah barbar dalam pidato tersebut juga menyiratkan sebuah konotasi untuk menunjuk kelompok yang menjadi musuh baru yang harus dilawan bersama. Kelompok yang dianggap barbar oleh Bush tersebut tidak secara eksplisit disebutkan siapa aktor tersebut. Tetapi, jika kita melihat pernyataan pidato Bush di kantor *National Security Strategy* pada September 2002 akan tahu siapa yang dimaksud kelompok barbar tersebut.

“The war on terrorism is not a clash of civilizations. It does, however, reveal the clash inside

a civilization, a battle for the future of the Muslim world. This is a struggle of ideas and this is an area where America must excel (Dannreuther & Peterson, 2006 : 2)”.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat memang perang melawan terorisme bagi Bush bukan perang peradaban, tetapi perang pada salah satu bagian dalam peradaban Islam sehingga kelompok barbar yang dimaksud dalam pidato Bush sebelumnya kuat sekali mengarah pada Islam. *Labeling* bahwa pemeluk Islam identik dengan teroris dan ajaran Islam adalah ajaran yang melahirkan terorisme menjadi suatu wacana global yang hegemonik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Blair sekutu dekat Bush yang lebih jelas lagi dengan menyebut empat ciri ideologi setan para teroris: anti Israel; anti nilai-nilai Barat; ingin menerapkan syariah Islam, dan mempersatukan umat Islam dengan Khilafah (BBCNews). Pernyataan Bush dan Blair tersebut jelas-jelas mecitrakan sosok pelaku teroris itu identik dengan orang Islam.

Gambar 1. Demonstrasi Santri Muhammadiyah Pasca Kematian

Siyono di Depan Polda DIY, 2016
(Sumber: Foto Amatir)



Jika dilihat dengan pendekatan biopolitik-nya Foucault, pernyataan Bush maupun Blair tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan diskursif yang mengancam HAM. Misalnya saja, ketika sebuah negara menerapkan regulasi konter terorisme dengan membuat indikator ciri-ciri seorang teroris seperti yang dinyatakan oleh Bush dan Blair tersebut tentu saja akan banyak orang-orang yang akan ditangkap dengan tuduhan terorisme padahal hanya memiliki pemikiran anti israel, anti nilai-nilai Barat, penegakan syariah, serta khilafah Islamiyah padahal itu menjadi bagian dari kebebasan sipil politik untuk menyuarakan pendapat.

Upaya hege-moni wacana “*war on terrorism*” menggunakan praktik biopolitik pernah juga dilakukan oleh Ansyad Mbai selaku ketua Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) Indonesia yang menuai banyak kritikan karena cenderung memperlihatkan kekerasan diskursif yang berdampak pada diskriminasi kelompok, pernyataan dia seperti berikut.

“Ciri-ciri radikalisme (mengutip pandangan Gus Dur dalam buku *Ilusi negara Islam*), antara lain bahwa kelompok itu suka mengkafirkan orang. Jangankan yang berbeda agama, yang berbeda saja, dalam tata ibadah, misalnya itu sudah dianggapnya kafir. Kedua, mereka selalu mengatasnamakan Tuhan untuk menghukum yang lain. Tujuan gerakan mereka adalah ingin mengubah negara bangsa menjadi negara agama. Ganti ideologi Pancasila dengan Islam versi mereka, mengganti NKRI dengan khilafah. Ini ancaman bagi NKRI, karena itu presiden selalu mengatakan, negara tidak boleh kalah (<https://qousa.wordpress.com/tag/ansyaad-mbai>).”

Kembali ke pernyataan Bush, bahwa perang melawan terorisme adalah perjuangan ide dan Amerika Serikat harus mengambil bagian. Pernyataan Bush tersebut mencerminkan bahwa dunia Islam

adalah dunia yang bermasalah dan Amerika Serikat harus masuk ke dalam dunia Islam untuk berjuang mempromosikan ide baru agar masa depan dunia Islam punya masa depan yang lebih bagus. Hal ini memperlihatkan bahwa Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme tersebut juga melakukan sebuah hegemoni wacana melalui praktik eksklusi, bahwa ide baru yang dibawa Amerika itu adalah ide yang beradab, sedangkan ide dalam dunia Islam adalah ide yang tidak beradab. Maka dari itu, dunia Islam harus mau menerima dan menerapkan ide baru dalam negaranya agar lebih maju dan beradab sebagaimana Amerika imajinasikan. Ide baru yang ingin dipromosikan ke dunia Islam sebagaimana Bush nyatakan tersebut adalah ide demokrasi, seperti yang Bush nyatakan dalam sebuah pidatonya :

“By strengthening Iraqi democracy, we will gain a partner in the cause of peace and moderation in the Muslim world and an ally in the worldwide struggle against the terrorists (<http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/11/30/AR2005113000667.html>).”

Dengan melakukan praktik eksklusi wacana ini, maka Amerika Serikat akan lebih mudah menghegemoni wacana tentang ide baru yang beradab dan setiap negara, bahkan negara-negara Islam harus mau mengakui dan menerimanya sebagai ide baru yang beradab, sedangkan ide yang lain tidak layak dengan peradaban dan harus diperangi. Ide baru yang dimaksud Amerika itu adalah demokrasi liberal Barat. Negara yang tidak mau tunduk pada hegemoni Amerika dalam memerangi terorisme akan dilabeli sebagai negara yang tidak demokratis. Praktik eksklusi juga akan muncul ketika sebuah negara (semisal : Indonesia) menerapkan regulasi konter terorisme dengan memberikan perbedaan definisi identitas antara warga negara yang baik dengan teroris. Identitas orang-orang atau kelompok yang diduga teroris sebagaimana yang AS wacanakan identik sebagai kelompok barbar, *evil*, dan tidak beradab.¹

¹ Lihat, Ricard Jackson, “Security, Democracy, and the Rhetoric of Counter-Terrorism”, dalam Jurnal *Democracy and Security*, 1:147–171, 2005. Buku ini memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana pemerintah AS

Hal ini nampaknya juga diterapkan oleh BNPT dalam mendefinisikan kelompok Islam yang moderat dengan kelompok Islam yang radikal. Kelompok Islam yang radikal diwacanakan BNPT sebagai teroris sehingga butuh di-*treatment* dengan program deradikalisasi agar kembali menjadi Islam yang moderat (http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130827_lapas_khusus_terorisme.shtml). Eksklusi wacana tersebut jelas-jelas bentuk kekerasan diskursif karena menciptakan sebuah isolasi, marginalisasi, dan diskriminasi orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap Islam-nya menyimpang dari pandangan Islam mayoritas. Kasus marginalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok Islam radikal menjadi fenomena umum di Indonesia yang seolah-olah mereka tidak layak hidup berdampingan dengan kelompok Islam mayoritas atau masyarakat umum padahal

menciptakan eksklusi wacana untuk membedakan identitas “*evil terrorist dengan good Americans*”. Eksklusi wacana yang dilakukan oleh AS dilakukan sebagai upaya hegemoni wacana dalam mendefinisikan kelompok-kelompok yang dianggap teroris dan kelompok-kelompok pro-Amerika.

dalam konteks kewarganegaraan dan HAM mereka memiliki hak sipil dan hak kewarganegaraan yang sama. Di sini terlihat jelas, akibat praktik eksklusi wacana tersebut berpeluang melanggar HAM kelompok yang dieksklusi dari wacana *mainstream*.

Hegemoni wacana “*war on terrorism*” dan kekerasan diskursifnya juga dilakukan dengan praktik “*governmentality*” dan praktik “*surveillance*” sebagaimana yang Foucault konsepsikan. Misalnya, wacana tentang kepengaturan perbankan yang mendisiplinkan bank-bank agar sensitif dan antisipatif terhadap tindak pencucian uang untuk terorisme,² yang salah satu muatannya untuk memastikan (baca: mengontrol dan *screening* administratif) bahwa identitas para nasabah tidak masuk dalam indikasi sebagai teroris dan transaksi perbankan yang dilakukannya bukan untuk kegiatan jaringan teroris. Para nasabah yang mengetahui regulasi tersebut seakan-akan

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

merasa diawasi identitas dan transaksi perbankannya yang membuat hak privasi mereka terlanggar.

Gambar 2. Akibat Dicap Teroris Jenazah Siyono Sempat Ditolak Dikuburkan di Kampungnya oleh Lurah Setempat.



Referensi (Sumber: Pemuda Muhammadiyah DIY)

Wacana kepengaturan “*war on terrorism*” tersebut juga menjalar sampai ke tata aturan di level masyarakat kampung karena ada himbuan dari aparat keamanan lokal ke warga agar mencurigai orang baru yang rumahnya tertutup dan jarang sosialisasi dengan warga sekitar karena orang-orang seperti itu merupakan ciri-ciri jaringan teroris. Adanya himbuan semacam itu menciptakan sebuah *panopticon effect* (efek ketakutan) dalam ranah pikiran dan kesadaran individu-

individu dalam masyarakat yang seolah-olah merasa selalu diawasi oleh aparat keamanan negara.

Kekerasan Diskursif Atas Nama “*War on Terrorisme*”: Bentuk Baru Pelanggaran HAM

Hegemoni wacana “*War on Terrorism*” ternyata memiliki dampak yang cukup serius terhadap HAM. Melalui analisis wacana yang penulis lakukan ditunjukkan beberapa sampel penggalan kalimat dari pernyataan-pernyataan, baik verbal maupun teks dari para *stakeholder* yang berwenang dalam proyek global “*war on terrorism*” mengarah pada sebuah bentuk kekerasan diskursif jika dilihat dengan perspektif Foucauldian. Kekerasan diskursif memang tidak melukai fisik atau menghilangkan nyawa seseorang atau kelompok yang menjadi korban dari serangan kekerasan diskursif tersebut, tetapi kekerasan diskursif berpotensi melanggar HAM karena akan mengisolasi, marginalisasi, mengeksklusi, dan diskriminasi hak-hak sipil dan hak-hak politik bahkan hak ekonomi sosial budaya orang-orang yang menjadi korban

kekerasan diskursif tersebut. Inilah bentuk baru pelanggaran HAM atas nama “*War on Terrorism*”.

Atas nama “kebaikan bersama” sebuah rezim dapat menciptakan sebuah hegemoni wacana yang dapat mengeklusi sebuah kelompok dari sistem politik yang ada. Bahkan atas nama aturan hukum, rezim dapat membuat kebijakan ataupun produk hukum lainnya untuk mengeklusi sebuah kelompok dari kehidupan politik maupun sosial. Politik eklusi menjadi wajah tersembunyi dari sebuah rezim kekuasaan karena dengan memainkan politik eklusi tersebut maka rezim akan berhasil membangun *status quo*. Kelompok atau orang-orang yang dieklusi akan diopinikan oleh rezim sebagai musuh bersama masyarakat dan ancaman ideologis negara.

Dalam kasus “*war on terrorism*”, agama saat ini disubjekkan sebagai *enemy of the state*. Kian radikal pemahaman agama kita, kian disubjekkan sebagai subjek yang membahayakan keamanan negara. Proyek terorisme global dan nasional adalah contoh bagaimana agama disubjekkan oleh negara modern

sebagai ancaman keamanan. Demi kestabilan politik, gerakan agama dijadikan proyek keamanan oleh negara modern. Keamanan di mata negara modern tidaklah ditujukan untuk keamanan penduduk tetapi untuk keamanan kapital demi stabilnya pasar.

Umat beragama selaku penduduk bukan prioritas yang harus dilindungi keamanannya oleh negara, tetapi justru menjadi sasaran moncong senjata aparat keamanan negara. Kemudian, untuk membe-rangus hak beragama/ hak berkeya-kinan, negara tidak hanya mengguna-kan *hardsecurity* tetapi juga *soft-security*. *Hardsecurity*, yaitu dengan penangkapan, penahanan, penyiksaan, penembakan, penculikan, pemen-jaraan, ataupun pembunuhan para aktivis keagamaan. Akhir-akhir ini juga memadukan keduanya, bentuk *softsecurity*, yaitu program deradikalisasi agama adalah sebuah strategi agar para ulama tidak lagi bersuara lantang menentang ketidak-adilan dan kezaliman kekuasaan.

Umat pun juga takut dan memilih diam ketika hendak menyuarakan tuntutan keadilan ataupun kezaliman

karena takut dicap sebagai teroris. Ketakutan dicap sebagai teroris ini mengidap aktivis-aktivis keagamaan, yang karenanya mereka seakan-akan terpenjara hak-hak sipil dan hak-hak politiknya di ruang publik. Kasus kematian Siyono adalah contoh menarik untuk merefleksikan tentang pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan diskursif atas nama “*war on terrorism*” di Indonesia.

Mengubah “*Raison de Etate*” Pemerintah Modern dan Rasionalitas Menangkal Terorisme: Epilog

Jika pemerintahan berjalan karena pemerintah memiliki otoritas kekerasan yang dilegalkan, maka terorisme juga berdiri atas nama kekerasan yang dibenarkan melalui ajaran ideologi tertentu sebagai upaya perlawanan atas kekuasaan hegemonik. Kekerasan yang menjadi “*Raison de Etate*” berdirinya pemerintahan modern ini bagi Foucauldian memiliki masalah yang cukup serius ketika harus mengatur penduduknya.

Salah satu pengaturan penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan modern adalah dengan cara *survei-*

lence yang kemudian juga mengandalkan perangkat keamanan negara bagi Foucauldian dianggap justru akan melanggengkan kekerasan itu sendiri. Logikanya, jika “*raison de etate*” berdirinya pemerintahan karena punya otoritas legal menggunakan kekerasan, maka logika ini juga akan dipakai penduduk untuk melawan kekuasaan hegemonik. Salah satu cara perlawanan yang dilakukan oleh penduduk untuk melawan kekuasaan hegemonik adalah dengan cara terorisme.

Terorisme adalah lahir dari “*raison de etate*” pemerintahan modern yang terlalu mengandalkan logika kekerasan dalam menundukan penduduknya agar disiplin dan taat terhadap pemerintah. Terorisme bukan lahir pasca 11 September 2001, tetapi sejak pemerintahan modern lahir pada abad-18 di Eropa. Kritik Foucauldian atas pemerintahan modern yang lahir pada abad-18 tersebut, melahirkan konsep *governmentality*. Dahulu, kekuasaan dijalankan dalam logika kekerasan untuk mengamankan kedaulatan negara, tetapi bagi Foucauldian bahwasanya pemerintahan pasca

abad-18 harus berjalan dengan nalar *govermentality*.

Governmentality adalah bentuk pemerintahan abad-21. Dia tidak lagi mengandalkan struktur aparat pemerintah dalam melakukan kontrol penduduk, tetapi lebih pada bagaimana mengatur dan mendisiplinkan wacana yang layak untuk dikonsumsi oleh penduduk agar seiring dengan kepentingan politik penguasa. Upaya memahami pemerintah di era liberal, tidak dapat lagi menggunakan pendekatan Weberian yang menekankan bahwa bicarannya pemerintah sama halnya berbicara tentang kerja-kerja teknis birokrasi, tetapi bagi Foucauldian kekuasaan bekerja melalui wacana yang diproduksi dan diatur oleh pihak penguasa.

Jika dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam memberantas terorisme pasca 11 September 2011, maka nalar *governmentality* dapat dijalankan ketika terorisme juga melakukan upaya-upaya perlawanan melalui produksi wacana yang dihasilkan dan disebarkannya. Pemerintah dapat menangkap dan menahan orang-orang yang disangka

atau dituduh sebagai teroris, tetapi pemerintah yang seperti itu hanya akan terjebak dalam nalar pemerintahan konvensional “menjaga keamanan negara”, tetapi bukan dengan nalar *governmentality*, yaitu mengelola rasional penduduknya. Semakin pemerintah modern mampu menciptakan dan mengatur rasionalitas penduduknya, maka terorisme atas nama apapun tidak akan lahir karena negara bukan lagi berdiri jauh di istana negara, tetapi negara mampu hadir dalam pikiran setiap penduduknya.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, & Dokumen

- Chalk, Peter. (2002). “The Response to Terrorism as a Threat to Liberal Democracy”. Dalam *Australian Journal of Politics & History*, Volume 44, Issue 3
- Dannreuther, Roland & John Peterson, John. (2006). *Security Strategy and Transatlantic Relations*. London: Routledge
- FDCH Transcript, 16 Sept 2001 : 3

- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. London: Penguin Books
- Foucault, Michel .(1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books
- Foucault, Michel.(1981). 'The Order of Discourse', dalam R. Young (ed.), *"Untying the text: A Post-Structuralist Reader"*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd
- Foucault, Michel. (1990). *The History of Sexuality, Volume I: An Introduction*. New York: Vintage Books
- Jackson, Ricard. (2005). "Security, Democracy, and the Rhetoric of Counter-Terrorism", dalam *Jurnal Democracy and Security*, 1:147–171
- Masykur, Shohib. (2008). *War on Terrorism dan Runtuhnya Hegemoni AS : Suatu Analisis Gramscian atas Tatanan Dunia Kontemporer*. Skripsi HI Fisipol UGM
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
- Soleim, Silje. (2006). *A Discourse Analysis of President George W. Bush's Declared War on Terrorism*. Master Program in Peace and Conflict Transformation in Univesity of Tromso
- Internet**
- <https://qousa.wordpress.com/tag/ansyaad-mbai/>. Diunduh 29 Juni 2014
- Transcript: *President Bush's Speech on the War on Terrorism*, lihat <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/30/AR2005113000667.html>. Diunduh 29 Juni 2014
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130827_lapas_khusus_terorisme.shtml. Diunduh 29 Juni 2014